



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# IMPLEMENTASI RELAKSASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN TERDAMPAK COVID -19 DALAM PENGELOLAAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU

## TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Ekonomi Syariah (M.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

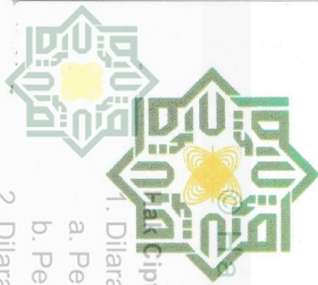


UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**FARRI FADLI**  
**NIM: 21790315635**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H./2021 M.**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama : FARRI FADLI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21790315635  
Gelara Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
Judul : IMPLEMENTASI RELAKSASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN  
TERDAMPAK COVID -19 DALAM PENGELOLAAN NON  
PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT. BANK  
TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU

Tim Penguji:

**Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec**  
Penguji I/Ketua

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
Penguji II/Sekretaris

**Dr. Khairil Anwar, MA**  
Penguji III

**Dr. Nurnasrina, M.Si**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

29/07/2021

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid -19 Dalam Pengelolaan Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Farri Fadli  
 NIM : 21790315635  
 Program Studi : Ekonomi Syariah (S2)  
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 29 Juli 2021.


Penguji I  
**Dr. Khairil Anwar, MA**  
 NIP.197407132008011011

  
 Tgl. 2021

Penguji II  
**Dr. Nurnasrina, M.Si**  
 NIP.198004052009012008

  
 Tgl. 2021

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
**Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec**  
 NIP. 198001042008011005

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid -19 Dalam Pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah cabang Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Farri Fadli  
 NIM : 21790315635  
 Program Studi : Ekonomi Syariah (S2)  
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 29 Juli 2021.

Pembimbing I  
**Dr. Mahyarni, SE., MM**  
 NIP.197008261999032001

Tgl. 2021

Pembimbing II  
**Dr. Hj. Julina, SE. M.Si**  
 NIP.197307221999032001

Tgl. 2021

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

**Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec**  
 NIP.198001042008011005





## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **"Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid 19 dalam Pengelolaan Non performing financing (NPF) Pada PT. Bank BTN Syariah cabang Pekanbaru "** yang ditulis oleh:

Nama : Farri Fadli  
NIM : 21790315635  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,  
Pembimbing I

**Dr. Mahyarni, SE., MM**  
NIP. 19700826 199903 2 001

Pekanbaru,  
Pembimbing II

**Dr. Julina, SE., MM**  
NIP. 19730722 199903 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
NIP. 19640508 199303 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Dr. Mahyarni, SE., MM**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : **Tesis saudara**  
**Farri Fadli**

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Farri Fadli
NIM	: 21790315635
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid 19 dalam Pengelolaan <i>Non performing financing</i> (NPF) Pada PT. Bank BTN Syariah cabang Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Juni 2021  
Pembimbing I

**Dr. Mahyarni, SE., MM**  
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. Julina, SE., MM**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS  
Perihal : **Tesis saudara**  
**Farri Fadli**

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Farri Fadli
NIM	: 21790315635
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid 19 dalam Pengelolaan <i>Non performing financing</i> (NPF) Pada PT. Bank BTN Syariah cabang Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Juni 2021  
Pembimbing II

**Dr. Julina, SE., MM**  
NIP. 19730722 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farri Fadli  
 NIM : 21790315635  
 Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 30 Oktober 1992  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Konsentrasi : Eonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **"Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid 19 dalam Pengelolaan *Non performing financing* (NPF) Pada PT. Bank BTN Syariah cabang Pekanbaru"**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2021



**FARRI FADLI**  
**NIM: 21790315635**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan serta kemampuan kepada penulis dalam upaya penyelesaian Tesis ini. Shalawat salam tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati ilmu pengetahuan hingga saat ini. Beliau juga merupakan figur yang wajib dicontoh bagi pemimpin-pemimpin muda serta kaum intelektual muslim.

Atas rahmat dan hidayah - Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesi yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan PerumahanTerdampak Covid-19 dalam Pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru”.

Dalam proses penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, ucapan terimakasih dan penghargaan setulus-tulusnya penulis peruntukan kepada :

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2. Prof. Dr. Afrizal, M, MA. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,.
3. Dr. Hj. Sitti Rahma, M.Si selaku ketua prodi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,.
4. Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Pembimbing I dan Dr. Julina, SE, MM selaku Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan pemikirannya dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membimbing penulis selama aktif dalam perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi keperluan penulis mulai dari masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian Tesis ini.
7. Ayahanda Yuzarai dan Ibunda Darnis dan Istri Nursapta Khairani yang telah mendo'akan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
8. Sahabat-sahabat dan keluarga besar penulis Ekonomi Syariah angkatan 2017 seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian Tesis ini.
9. Seluruh pemimpin dan staff PT. BTN Syariah cabang Pekanbaru yang telah membantu dalam proses penulisan Tesis ini.

Mudah-mudahan dengan segala bantuan, dukungan serta do'a yang telah diberikan dapat diterima sebagai amal jariyah yang tak terputus dan mudah-mudahan Allah swt akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar dan lebih mulia. Mengingat masih terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, maka dari itu penulis sadar akan kekurangan dan kesempurnaan dalam penulisan Tesis ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata penulis ucapkan Billahitaufiq wal hidayah,

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

**FARRI FADLI**

**NIM. 21693104665**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan karya ini untuk tujuan komersial tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMING</b>	
<b>PERSETUJUAN KETUA PRODI</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 1</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING 1</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK 3 BAHASA .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Istilah .....	9
C. Identifikasi Masalah.....	12
D. Pembatasan Masalah .....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Bank Syariah .....	15
1. Pengertian Bank Syariah .....	15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah .....	16
3. Fungsi dan Peran Bank Syariah .....	18
4. Jenis Bank Syariah .....	18
5. Prinsip Operasional Bank Syariah .....	20
6. Prinsip Pemberian Pembiayaan .....	23
B. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	24
1. Pengertian <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	24
2. Sebab-sebab Terjadinya <i>Non Performing Financing</i> .....	29
3. Kolektabilitas Pembiayaan .....	30
4. Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	31
C. Relaksasi Pembiayaan .....	35
1. Pengertian Relaksasi .....	35
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	37
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	37
2. Tujuan Pembentukan OJK .....	38
3. Tugas OJK dibidang Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan .....	40
4. Tugas OJK dibidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat .....	41
E. Kebijakan .....	41
1. Pengertian Kebijakan .....	41
F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah .....	46
G. Pelitian Yang Relevan .....	52

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	59
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
C. Keys Informan Penelitian .....	61
D. Sumber Data .....	62
E. Teknik Pengolahan Data .....	64



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan .....	66
G. Kerangka Berfikir .....	68

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara .....	69
1. Sejarah Berdirinya Bank Tabungan Negara .....	69
2. Visi dan Misi PT.BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.....	73
3. Struktur Organisasi PT.BTN Syariah Pekanbaru .....	74
4. Produk PT.BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru .....	80
B. Implementasi Relaksasi kredit di PT.BTN Syariah Cabang pekanbaru .....	85
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Relaksasi Pembiayaan Pada PT.BTN Syariah cabang Pekanbaru .....	91
D. Pengelolaan NPF di PT.BTN Syariah cabang Pekanbaru Setelah Implementasi Relaksasi Kredit.....	95
E. Hasil Analisis .....	102

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A Kesimpulan .....	104
B Saran .....	104

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 106**

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	I.1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Indonesia 2020 .....	3
Tabel	I.2 Data <i>Non Performing Financing</i> 2018-2020 PT. BTN Syariah cabang Pekanbaru .....	8
Tabel	II.1 Kriteria Penilaian Peringkat NPF .....	25
Tabel	II.2 Tingkat dan Kategori Kolektabilitas Tunggakan Nasabah .....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I. Kerangka Berfikir .....	58



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = ‘	ء = ‘
	غ = gh	ي = y

- Vokal Panjang(*mad*) â = aa
- Vokal Panjang(*mad*) î = ii
- Vokal Panjang (*mad*) û = uu

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*

### 3. Vokal Pendek

*Fathah* ditulis a, misalnya شريعة (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. VokalRangkap

او dituli saw, أُو dituli suw, أي dituli say, dan اي ditulis iy.

#### 5. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, seperti mait, bila dihidupkan ditulist , misalnya الميثة dituli sal- maitatu,

#### 6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan syamsiyyah, ditulis al, misalnya المسلم ditulis al-Muslim, الدار ditulis al-Dar. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis Abdullah.

#### 7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

**Farri Fadli (2021)**

## ABSTRAK

: Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan  
Terdampak Covid – 19 dalam Pengelolaan *Non  
Performing Financing* (NPF) Pada PT. Bank  
Tabungan Negara Syariah cabang Pekanbaru

Seperti halnya kejadian luar biasa lainnya Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang relaksasi kredit terdampak covid-19, dimana para debitur perbankan diberikan keringanan berupa *rescheduling, restructuring, dan reconditioning*. Pasca terbitnya POJK tentang relaksasi kredit bagi debitur terdampak covid-19, BTN Syariah telah membuka diri untuk memberikan kebijakan restrukturisasi bagi kredit debitur yang kreditnya dibiayai perseroan dan terdampak virus tersebut sehingga terganggu kemampuan bayarannya. Sampai saat ini BTN Syariah mencatat lebih dari 17.000 telah di restrukturisasi di seluruh Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Peneliti melihat kepada implementasi relaksasi kredit perumahan pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru dalam pengelolaan NPF, sehingga dari hasil pengumpulan data tersebut peneliti mengetahui tentang implementasi relaksasi kredit perumahan dalam pengelolaan NPF di PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi relaksasi pada BTN Syariah cabang Pekanbaru yaitu (1) debitur yang terdampak langsung maupun tidak langsung pada sektor usahanya dapat diberikan relaksasi selama enam bulan sampai dua belas bulan maksimal untuk keringanan pembayaran. (2) Faktor penghambat dari penelitian ini adalah banyak debitur tidak mengetahui tentang mekanisme dan syarat-syarat pengajuan relaksasi pembiayaan, (3) Pengelolaan NPF setelah adanya relaksasi pembiayaan adalah dengan melakukan penyematan kredit dan penyelesaian kredit.

**Kata Kunci:** Relaksasi, Pembiayaan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Farri Fadli (2021)**

: Implementation of Housing Financing Relaxation Impacted by Covid-19 in Managing *Non-Performing Financing* (NPF) At PT. Tabungan Negara Syariah Pekanbaru Branch

As with other extraordinary events, the Financial Services Authority issued Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning credit relaxation affected by COVID-19, in which banking debtors were given relief in the form of rescheduling, restructuring, and reconditioning. After the issuance of the POJK regarding credit relaxation for debtors affected by COVID-19, BTN Syariah has opened itself to provide restructuring policies for debtors whose loans are financed by the company and are affected by the virus so that their ability to pay is disrupted. BTN Syariah has recorded that more than 17,000 have been restructured throughout Indonesia. This research is a field research with a qualitative descriptive analysis which after all the data has been collected, the author can explain in detail and systematically so that it can be fully described and the final conclusion can be clearly understood. Researchers look at the implementation of housing credit relaxation at PT. Bank BTN Syariah Pekanbaru Branch in NPF management, so from the results of data collection, researchers know about the implementation of housing credit relaxation in NPF management at PT. BTN Syariah Pekanbaru Branch. The results of this study are the implementation of relaxation at BTN Syariah Pekanbaru branch, there are (1) debtors who are directly or indirectly affected by the business sector can be given relaxation for six months to twelve months maximum for payment relief. (2) Many debtors who do not know about the mechanism and requirements for applying for financing relaxation, (3) NPF management after the relaxation of financing is to do credit embedding and credit settlement.

**Keyword:** *Relaxation, Financing*



## ملخص

فر فضلى : "تنفيذ إسترخاء التمويل الإسكان المتضرر فيروس كورونا في الإدارة نون  
فر فورمينك فيننسينك (NPF) في الشركة المحدودة بنك تابونان نيغار الشريعة فرع  
فكنبارو."

كما في الحوادث النفيسة الأخرى هيئة الخدمة المالية يشرع رقم 11/POJK.03/2020 عن  
إسترخاء الإئتمان المتضرر فيروس كورونا، أن سائر المدين المصرفية يجد الرخصة مثل  
إعادة الجدول، إعادة البناية، وإعادة الحالة. بعد ظهوره PJOK عن الإسترخاء الإئتمان  
على المدين المتضرر فيروس كورونا، بيك تابونان نيغار الشريعة فتحت نفسه في السياسة  
إعادة البناية على الإئتمان المدين الذي دفع إئتمانه بفرسيروان ومتضرر فيروس حتى  
إنزعج على قوة ماله. والآن كان بيك تابونان نيغار الشريعة كتبت أكثر من 17.000 المدين  
مصيب على إعادة البناية في إندونيسيا.

هذا البحث بحث الميداني (Field Research) بتحليل الوصفي النوعي بعد جمع كل البيانات.  
فيشرح الكاتب بالتفصيل وشكل المنهجي حتى يفهم ظاهرا على آخر الخلاصة. رأى الباحث  
إلى تنفيذ الإسترخاء التمويل الإسكان في بيك تابونان نيغار الشريعة فرع فكنبارو في الإدارة  
NPF ، وكان على حاصل جمع البيانات يعلم الباحث عن تنفيذ إسترخاء الإئتمان الإسكان  
في إدارة NPF في بيك تابونان نيغار الشريعة فرع فكنبارو.

ونتايج من هذا البحث هي تنفيذ الإسترخاء في بيك تابونان نيغار الشريعة فرع فكنبارو منها  
1. المدين المتضرر فورا او غير فور في قطاع سعيه يجد الإسترخاء لسته أشهر حتى اثنا  
عشر شهرا لرخصة التقسيط. 2. من عناصر هذا البحث هي لا يعرف كثير من المدين عن  
كيفية والشرائط الإسترخاء التمويل. 3. إدارة NPF بعد وجود إسترخاء التمويل بالتضمن  
الإئتمان وإجراءه.

الكلمة الدالة : الإسترخاء، التمويل





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara sederhana permasalahan perumahan dan pemukiman adalah tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinnya. Kebutuhan akan hunian akan semakin tinggi dan disertai dengan faktor keterbatasan masyarakat dalam pemenuhannya, hal ini menyebabkan kecendrungan sarana hunian masyarakat yang tidak mudah untuk dikendalikan menjadi pemukiman kumuh. Tingginya biaya pembangunan sebuah rumah dan sulitnya mencari lahan yang tepat untuk perkotaan, mendorong para pengembang dan pemerintah memberikan suatu alternatif berupa Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR). Upaya tersebut agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki sebuah rumah sendiri, dan dapat mendukung penataan kota yang baik. Kepemilikan rumah juga merupakan faktor yang dapat mendukung kemakmuran suatu negara, dan juga merupakan hak bagi setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal.

Berbicara mengenai KPR, menurut UU Pasal 1 angka 3 No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, rumah yang dibangun oleh penyelenggara pembangunan perumahan dapat dijual kepada konsumen dengan sistem pembayaran lunas, tetapi tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk membeli rumah yang dibangun dengan sistem pembayaran lunas disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, untuk memberikan kesempatan kepada konsumen agar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat memiliki rumah yang dibangun oleh penyelenggara pembangunan perumahan dapat ditempuh dengan pembelian secara kredit melalui KPR.

Dunia perbankan Indonesia mendefinisikan perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Hal ini termuat di dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 ayat 1. Dalam UU Perbankan Syariah tahun 2008, Istilah “Perbankan Syariah” secara eksplisit disebutkan (pasal 1). Hal ini tentu memberikan arti penting bagi posisi perbankan syariah diakui secara legal oleh undang-undang. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, perbankan di Indonesia haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Perbankan syariah beberapa tahun belakangan ini sedang naik daun, dipicu dengan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehalalan dalam bertransaksi dengan perbankan. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu perkembangan perbankan syariah sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu *market*, bagi hasil, pinjaman bank syariah atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip sewa (*ijarah*) dan lainnya di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” dalam Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Cet. I; Bandung:2009), h 133.

<sup>2</sup> Hasani Ahmad, *Menimbang Perbankan Syariah* dalam Jurnal Bimas Islam (Vol. 2. No. 3, 2009), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Meningkatnya pemberian persetujuan pembiayaan baru dikarenakan 2 (dua) alasan yakni, dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, kemampuan permodalan yang masih cukup kuat dan permintaan kredit/pembiayaan yang meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya iklim ekonomi yang ditandai oleh membaiknya prospek usaha nasabah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah atau bahkan macet atas pembiayaan yang diberikan. Akibat yang ditimbulkan dari pembiayaan yang macet adalah tidak terpenuhinya kewajiban mengembalikan pembiayaan yang diberikan tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan. Berikut laporan perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia 2016-2020.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Perbankan di Indonesia 2016-2020**

Tahun	Dalam Miliar
2016	93.713
2017	118,651
2018	145.507
2019	171.270
2020	186.773

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2020

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia setiap tahun selalu meningkat ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan syariah selalu meningkat setiap tahunnya.

Regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Umum dan Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>3</sup> Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah atau debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank tersebut. Resiko pembiayaan merupakan resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>4</sup> Dalam banyak kasus pembiayaan bermasalah perbankan karena bencana alam, sering kali posisi perbankan mengalami dilema, ibarat buah *simalakama*, disatu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Disisi yang lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dan intensitas resmi dalam sebuah negara.

<sup>3</sup> Sutojo, Siswanto *Menagani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2009), h. 61.

<sup>4</sup> Adiwarman A Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2010)h, 260



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa kasus, semisal gempa bumi dan tsunami terjadi di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta namun diyakini meninggalkan banyak persoalan, bukan hanya sektor riil dan perbankan saja, tetapi juga tak kalah penting adalah persoalan nasib masa depan para korban yang menjadi nasabah perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlakuan khusus terhadap para debitur yang menjadi korban. Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam ini berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah menyangkut pembiayaan (*mudharabah dan musyarakah*), piutang (*mudharabah, salam, istisna*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qard*), dan penyediaan dana lain. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan OJK SP 66/DHMS/OJK/X/2018. Kebijakan ini mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.<sup>5</sup>

Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* merupakan virus corona yang berasal pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Diduga *Covid 19* berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China. Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran pandemi *Covid 19* semakin pesat, hingga 29 Maret 2020 tercatat 198 negara yang terinfeksi oleh *Covid-19*. Indonesia

---

<sup>5</sup><http://www.ojk.go.id> diakses pada 20 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi *Covid-19* pada 29 Maret 2020 mencatat 893 orang positif terinfeksi virus corona. Diantaranya 35 orang sembuh, 780 orang dalam perawatan dan 78 orang meninggal.<sup>6</sup>

Seperti halnya kejadian luar biasa lainnya Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang relaksasi kredit terdampak *Covid-19* dimana para debitur perbankan diberikan keringanan berupa *rescheduling, restructuring, dan reconditioning*. Pasca terbitnya POJK tentang relaksasi kredit bagi debitur terdampak *Covid-19*, BTN Syariah telah membuka diri untuk memberikan kebijakan restrukturisasi bagi kredit debitur yang kreditnya dibiayai perseroan dan terdampak virus tersebut sehingga terganggu kemampuan bayarnya. Sampai saat ini BTN Syariah mencatat lebih dari 17.000 telah di restrukturisasi di seluruh Indonesia.

Fenomena yang muncul saat pemerintah mengumumkan tentang Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang relaksasi kredit pertama kali di bulan Maret 2020 banyak masyarakat menganggap bahwa kredit yang dijalani saat ini langsung tidak perlu dibayar dalam jangka waktu tiga sampai enam bulan kedepan sehingga pada tanggal jatuh tempo kredit bulan berikutnya, terjadi kebingungan. Disatu sisi pemerintah telah mengumumkan tentang adanya keringanan pembayaran pembiayaan, disisi lain perbankan meminta kewajiban dari nasabah tersebut. Relaksasi mempunyai tata cara tersendiri dan nasabah banyak tidak mengetahuinya. Dari segi besaran angsuran secara tidak langsung efek dari tidak memenuhi kewajiban selama 6 bulan ini berakibat naiknya angsuran di bulan ke 7

---

<sup>6</sup><https://sukabumiupdate.com/posts/66831/dampak-pandemi-Covid19-pada-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>, Di akses pada 10 Agustus 2020 Jam 09.53 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai selesai pembiayaan setelah relaksasi pembiayaan ini. Belum lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, semisal surat keterangan terdampak *Covid 19*, form penghasilan dan lain-lain.

Disatu sisi nasabah menganggap dari relaksasi kredit ini memang betul-betul diberikan keringanan terhadap pembiayaan yang sedang berjalan namun pada sisi lain nasabah banyak menganggap bahwa relaksasi hanya menunda kewajiban dan memberatkan pembayaran di kemudian hari.

Rata-rata perbankan terkena imbas dari pandemi *Covid 19* termasuk BTN Syariah Cabang Pekanbaru. Bank BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BTN yang menjalankan prinsip syariah. Penanganan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru dalam menghadapi pandemi *Covid 19* ini adalah memberikan relaksasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak langsung maupun tidak langsung terhadap *Covid 19* berupa keringanan pembayaran selama 6 bulan terhitung sejak dilakukan relaksasi kredit.<sup>7</sup>

Rata-rata pembiayaan perumahan menggunakan jangka waktu yang panjang 180 bulan atau 15 tahun sampai 240 bulan atau 20 tahun, jika dilakukan relaksasi kredit selama enam bulan dari sekarang maka jangka waktu menjadi 186 bulan untuk yang 15 tahun dan 246 bulan untuk yang 20 tahun. Jika terjadi penambahan pembayaran maka dirasa sangat memberatkan jika dikalikan dengan jangka waktu yang panjang. Belum lagi jangka waktu ditambah setelah jatuh tempo pembiayaan, jika nasabah menginginkan angsuran yang sama makan setelah jatuh tempo kredit ditambah jangka waktu pembayaran selama 12 bulan.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ferro Diputra Syabwa, staff *colletion* BTN Syariah cabang Pekanbaru, (Tanggal, 12 Agustus 2020 Jam 13.18 WIB)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keseluruhan nasabah yang telah melakukan relaksasi kredit di BTN Syariah Cabang Pekanbaru adalah 2086 orang dengan outstanding Rp. 205.829.705.273,- sedangkan total nasabah sebanyak 14.451 orang dengan **outstanding** Rp. 1.358.232.832.035,- sedangkan total NPF restrukturisasi adalah 296 orang dengan outstanding Rp. 26.949.957.820,-

**Tabel I.2**  
**Data Non Performing Financing (NPF)**  
**PT. BTN Syariah cabang Pekanbaru 2018-2020**

NPF	2018	2019	2020
<i>Consumer</i>	0,11%	0,33%	0,35%

*Sumber : Data Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru*

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentasi NPF *consumer* pada tahun 2018 sebesar 0,11% dan pada tahun 2019 sebesar 0,33% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,35%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan NPF setiap tahunnya.

Situasi ini tentunya membuat nasabah merasa terbantu ditengah kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Dengan kondisi perekonomian yang terpuruk diakibatkan pandemi Covid 19 maka perbankan diharapkan bisa mengatur strategi untuk menghindari atau meminimalisir pembiayaan bermasalah mengacu kepada POJK Nomor 11 tahun



2020. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul ***Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid-19 dalam Pengelolaan Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru.***

## B. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).<sup>8</sup> Berikut pengertian implementasi menurut para ahli<sup>9</sup>:

- a. Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan
- b. Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target grup*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.
- c. Sudarsono, didalam bukunya Analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
- d. Solichin Abdul Wahab, menurutnya implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi KE-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 131

<sup>9</sup> <http://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>, 7 Agustus 2021 pukul 10.00

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dapat penulis simpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2. Corona Virus

Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *MERS* dan *SARS*. Gejala corona virus yang paling umum adalah demam, kelelahan dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala – gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap.<sup>10</sup>

## 3. Pengelolaan

Beberapa kutipan pengertian-pengertian pengelolaan menurut para ahli<sup>11</sup>:

- a. Rebert T. Kiyosaki dan Sharon L, pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi.

<sup>10</sup><https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> 18 Agustus 2020 pukul 11.10 wib.

<sup>11</sup><https://swdinside.blogspot.com/2015/11/pengertian-pengelolaan.html>, 7 Agustus pukul 11.00 wib.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Wollenberg, pengelolaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia.
- c. Soekanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.
- d. Ibrahim Mamat, pengelolaan adalah pengaturan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan semua elemen.

Dapat disimpulkan pengelolaan merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

#### 4. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (pembiayaan bermasalah).<sup>12</sup> Dikatakan kolektibilitas kurang lancar apabila debitur mengalami penunggakan angsuran kredit mulai 91-120 Hari dari jadwal pembayaran seharusnya. Diragukan, jika debitur mengalami penunggakan angsuran kredit mulai 121-180 Hari dari jadwal pembayaran seharusnya. Macet apabila debitur mengalami penunggakan angsuran kredit selama lebih dari 180 hari dari jadwal pembayaran seharusnya.

---

<sup>12</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm. 359.



### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. PT. Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru belum secara maksimal dalam pengelolaan NPF dimasa pandemi *Covid 19*.
2. Program relaksasi pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru hanya dapat menunda permasalahan NPF untuk sementara waktu.
3. Pelaksanaan relaksasi secara berlebihan menyebabkan menurunnya pendapatan bunga atau margin perbankan dalam waktu tertentu sehingga mengganggu cash flow PT. Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

### D. Pembatasan Masalah

Dari judul tesis diatas, maka pembahasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui implementasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak *Covid 19* dalam pengelolaan NPF pada Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

### E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana implementasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak *Covid 19* di Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak *Covid 19* di Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bagaimana pengelolaan NPF BTN Syariah setelah impelentasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak *Covid 19*?

## F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk menganalisa implementasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak *Covid 19* di PT. Bank BTN Syariah cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja penghambat implementasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak *Covid 19* di PT. Bank BTN Syariah cabang Pekanbaru.
3. Untuk melihat efektifitas implementasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak *Covid 19* terhadap NPF PT. Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun teoritis.

1. Bagi Penulis, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bagi Program Pascasarjana, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan sumbangan informasi sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan peningkatan potensi sumberdaya manusia.

3. Bagi Perusahaan, dapat menjadi catatan untuk koreksi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan dan kelemahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Istilah “Bank” berasal dari kata Italia “Banco” yang berarti “Kepingan papan tempat buku” atau sejenis meja. Kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukkan “meja” tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari sinilah awal mula timbulnya perkataan bank. Kisah diatas mungkin benar, karena urusan bank dimasa lampau diambil alih oleh para penukar uang. Banco atau meja para pengusaha bank pada abad pertengahan akan dimusnahkan oleh khalayak ramai jika ia gagal menjalankan fungsinya dan dari sinilah timbulnya istilah “bangkrut”.<sup>13</sup>

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h.1

<sup>14</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.49.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.<sup>15</sup>

Pada awalnya penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat Islam agar melaksanakan semua aspek kehidupannya. Termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan semua aspek kehidupannya. Termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saat ini, sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah terintegritasi dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan negara-negara Islam.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada pembagian penjelasan

<sup>15</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 14

<sup>16</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 408.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Syariah untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

- 2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai payung hukum dalam undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>17</sup> Dalam menjalankan fungsinya bank syariah dan konvensional sebenarnya sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat serta menyediakan jasa layanan perbankan lainnya. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada prinsip operasional yang digunakannya. Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan

---

<sup>17</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 31-39.

prinsip bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai kreditur dan debitur.<sup>18</sup>

### 3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah diantara sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

### 4. Jenis – jenis Bank Syariah

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan

<sup>18</sup> Ahmad Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h.55.

<sup>19</sup> Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR Konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.<sup>20</sup>

a) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai devisa atau Bank Non Devisa.<sup>21</sup>

b) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit usaha syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.<sup>22</sup>

c) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

<sup>20</sup> Veithzal Riavai dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 765-766.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 767

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan jasa dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas perusahaan daerah atau koperasi.<sup>23</sup>

## 5. Prinsip – prinsip Operasional Bank Syariah

### a. Prinsip Titipan (al-wadi'ah)

#### 1. Wadi'ah yad amanah (trustee depository)

Barang titipan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan atau tidak diberikan izin oleh pemilik barang.

#### 2. Wadi'ah yad dhomanah (guarantee depository)

Barang titipan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

### b. Prinsip Bagi Hasil (profit sharing)

#### 1. Al-Mudharabah

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).

- Muthlaqah (cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi)
- Muqayyadah (dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara dan obyek investasi )

#### 2. Al-Musyarakah

Menurut fiqih ada 2 (dua) bentuk musyarakah, yaitu:

- a) Terjadinya secara otomatis disebut syarikah Amlak

---

<sup>23</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Terjadinya atas dasar kontrak disebut syarikah Uqud

Syarikah Uqud ada 5 jenis, yaitu:

##### - Syirkah Inan

Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota harus sama, Masing-masing anggota berhak penuh aktif dalam pengelolaan perusahaan, Pembagian keuntungan bisa dilakukan menurut besarnya modal dan bisa berdasarkan persetujuan.

##### - Syirkah Mufadhah

Kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota, Setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha, Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.

##### - Syirkah Wujuh

Para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka, tanpa menyertakan modal, Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.

##### - Syirkah Abdan

Pekerja atau usahanya berkaitan, Menerima pesanan dari pihak ketiga, Keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian.

##### - Syirkah Mudharabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip Jual Beli (al-tijarah)

1. Al-Murabahah

Merupakan persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok dan ditambah dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

2. Salam

Merupakan prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka( secaratunai).

3. Istishna

Menyerupai salam, tetapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (cicilan). Sementara untuk penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

d. Prinsip Sewa (al-ijarah)

1. Ijarah (sewa murni)

2. Ijarah al muntahiya bit tamlik ( penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa )

Ada juga instrument lain juga yang merupakan bagian dari sewa, yakni:

- Al-Ta'jiri

Dimana dalam perjanjian ini setelah berakhir masa sewa, pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

e. Prinsip Jasa (fee based service)

1. Al- Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

2. Al-Kafalah

Dimana jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga (3) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (2) atau yang ditanggung.

3. Al-Hawalah

Merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4. Al-Rahn

Dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

5. Al-Qardh

Dimana pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

**6. Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Ada beberapa prinsip pemberian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisa 5C. Adapun prinsip 5C itu antara lain:

- a. *Character* : Adalah sikap atau watak seseorang, dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau watak dari orang – orang yang akan diberikan pembiayaan benar – benar dapat dipercaya.<sup>24</sup>

- b. *Capacity* : Adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.<sup>25</sup>
- c. *Capital* : Adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.<sup>26</sup>
- d. *Collateral* : Adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik<sup>27</sup>
- e. *Condition* : Adalah dalam menilai pembiayaan hendak juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing – masing.<sup>28</sup>

## B. *Non Performing Financing* (NPF)

### 1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Resiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah resiko pembiayaan. Resiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kendali cicilan pokok ataupun keuntungan yang yang diperoleh dari pembiayaan dari investasi yang diberikan.<sup>29</sup> Resiko tersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan

<sup>24</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 136

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 137

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 263.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan dengan perjanjian yang disepakati oleh bank dan nasabah.<sup>30</sup>

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “Pembiayaan Bermasalah”.<sup>31</sup> Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “Pembiayaan *Non* – Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.<sup>32</sup>

Yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut. Hal ini karena pembiayaan merupakan faktor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang

<sup>30</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013) Hal. 124.

<sup>31</sup> H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 66.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diberikan deposit kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut.<sup>33</sup>

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau Amwal Mustamirah Ghairu Najihah.<sup>34</sup> Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan atau *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan Internasional.<sup>35</sup>

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.<sup>36</sup>

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

<sup>33</sup> Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financing Institution Management Conventional & Shariah System*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 477.

<sup>34</sup> Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, Kamus Istilah keuangan dan Perbankan syariah, h. 4

<sup>35</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan bank syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2012), h. 89

<sup>36</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Mengalami kesulitan didalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok dan atau pembayaran bagi hasil maupun biaya-biaya yang menjadi beban debitor.
- 3) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkn diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belim mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 4) Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitor sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 5) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah debitor yang bersangkutan.
- 6) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bagi bank, semakin dini mengganggu pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah, maka semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.<sup>37</sup> Mengingat tanggung jawab bank lebih berat ketika pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dicairkan kepada nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka

<sup>37</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), Hal. 91-92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regulator monitoring*, yaitu dengan monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif adalah mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/ *call report* kepada komite pembiayaan, sedangkan monitoring pasif adalah memonitoring pembayaran nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.<sup>38</sup>

Agar terhindar dari NPF bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*Character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*) dan 7P (*personality, party, payment, prospect, purpose, profitabilitas dan protection*).<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Trisadini, P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), Hal. 101

<sup>39</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014) hal. 204



**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Fiancing***

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs Tanggal 30 Oktober 2007

## 2. Sebab- sebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan menjadi lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada bank berpotensi atau menyebabkan kegagalan.<sup>40</sup>

Adapun beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain.<sup>41</sup>

### 1) Faktor Internal, antara lain:

- (a) kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah;
- (b) kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah;
- (c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan;
- (d) Perhitungan modal kerja tidak berdasarkan bisnis usaha nasabah;
- (e) Proyeksi penjualan terlalu optimis;
- (f) Proyeksi penjualan tidak diperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor;
- (g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*;

<sup>40</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 92.

<sup>41</sup> Trisadini, P. Usanti dan Abd. Somad, *Op.Cit.*, h. 102 -103.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(h) Lemahnya supervisi dan monitoring;

(i) Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang mempengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

#### 2) Faktor Eksternal, antara lain:

(a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya);

(b) melakukan *sidestreaming* penggunaan dana;

(c) kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha;

(d) Usaha yang dijalankan relatif baru;

(e) Bidang usaha nasabah telah jenuh;

(f) Tidak mampu menanggulangi masalah kurang menguasai bisnis;

(g) Meninggalkan *keyperson*;

(h) Perselisihan sesama direksi;

(i) Terjadinya bencana alam;

(j) Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

### 3. Kolektabilitas Pembiayaan

Menurut Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja kredit bermasalah (NPF) menunjukkan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas 3 hingga 5 dengan total kredit yang diberikan

oleh bank. Kolektabilitas menunjukkan kelancaran penagihan tunggakan atau kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan.

Perhitungan kredit bermasalah:<sup>42</sup>

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kolektabilitas 3 s/d 5}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Total Kredit yang Diberikan

Ketidak lancar nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan yang menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan.<sup>43</sup>

**Tabel 2.2**

**Tingkat dan Kategori Kolektabilitas Tunggakan Nasabah**

Tingkat	Jumlah Hari Tunggakan	Kategori kolektabilitas
1	0	Lancar
2	1 – 90 hari	Dalam Perhatian Khusus
3	91 – 180 hari	Kurang Lancar
4	181 – 270 hari	Diragukan
5	> 270 hari	Macet

*Sumber: Buku Tri Hendro dan Conny Tjandra Raharga yang berjudul Bank & Institusi Keuangan non Bank di Indonesia*

#### 4. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas ketika jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibatkan kerugian bagi bank syariah.<sup>44</sup> Hal tersebut

<sup>42</sup> Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014) hal. 201.

<sup>43</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 312.

<sup>44</sup> Trisadini, P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), hal. 108.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

merupakan pembiayaan bermasalah. Upaya awal dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar memperoleh hasil yang maksimal, maka perlu dilakukan penagihan secara intensif terhadap nasabah bermasalah oleh bank yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan sebelum masuk dalam upaya penyelamatan. Pembinaan pembiayaan bermasalah berupa pendampingan kepada nasabah bermasalah. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembiayaan yang terjadi murni karena aktivitas usaha atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah dari fasilitas yang diterimanya.<sup>45</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bagi hasilnya melewati 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.<sup>46</sup>

*Non Performing Financing* pada mulanya diawali dengan terjadinya wanprestasi yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah,

<sup>45</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 94

<sup>46</sup> Veithzal Rivai dan Riffki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 244.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.<sup>47</sup>

Dari aktivitas pendampingan tersebut, bank dapat menetapkan nasabah mana yang dapat dilakukan penyalamatan terhadap pembiayaannya dan mana yang harus dilakukan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan bank terhadap nasabah bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha nasabah yang bersangkutan dan kualitas pembiayaannya berdasarkan atas analisis bank, nasabah tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalankannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank dari potensi resiko yang lebih besar.<sup>48</sup>

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah

<sup>47</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 206.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 95

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>49</sup>

Tindakan yang dilakukan bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah antara lain:<sup>50</sup>

#### 1) *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* (R3)

- a) *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, diantaranya meliputi pengurangan pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil atau margin dan pemberian potongan.
- c) *Restructuring*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai *rescheduling* atau *reconditioning*.

#### 2) Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah ketika berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha tidak ada dan/atau

<sup>49</sup> H.Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 66.

<sup>50</sup> Trisadini, P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), hal. 109-115.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan disesuaikan dengan lembaga yang membebani benda jaminan tersebut.

### 3) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan kaulus dalam perjanjian pembiayaan, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

### 4) Penyelesaian lewat litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bila nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

## C. Relaksasi Pembiayaan

### 1. Pengertian Relaksasi

Pengertian relaksasi secara umum yaitu pelanggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan.<sup>51</sup> Kemudahan yang diberikan oleh perbankan dalam mendukung relaksasi kredit terhadap debitur salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya

---

<sup>51</sup> Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hal. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beriktikad baik. Nasabah beriktikad baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dapat diukur kemauan dan kemampuan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:<sup>52</sup>

- a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya.
- b. Nasabah bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar.
- c. Nasabah memberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan.
- d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan bahwa utang debitur yang dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila:<sup>53</sup>

- a. Perusahaan debitur masih memiliki proses usaha yang baik untuk mampu melunasi hutang (hutang-hutang) tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan pelunasan hutang (hutang-hutang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi

<sup>52</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Surabaya: Revka Pertra Media, 2014), hal. 100

<sup>53</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000), hal. 380.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keringanan- keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan hutang baru.

- b. Hutang (hutang-hutang) debitur dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para kreditur akan memperoleh pelunasan hutang-hutang mereka yang jumlah nya lebih besar melalui restrukturisasi dari pada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit, atau
- c. Apabila syarat-syarat hutang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditur dari pada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

Upaya restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan, melalui :<sup>54</sup>

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

#### D. Otoritas Jasa Keuangan

##### 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi

---

<sup>54</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan *non-bank* seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan *non-bank* dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.<sup>55</sup>

Secara umum, dapat dikatakan bahwa otoritas jasa keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.<sup>56</sup>

## 2. Tujuan Pembentukan OJK

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang di jalankannya

<sup>55</sup> <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 Pukul 20.42 Wib.

<sup>56</sup> Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik.<sup>57</sup>

Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan *non-bank*. Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu di kementerian keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015.<sup>58</sup>

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap

<sup>57</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Ed Revisi 2014,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 323.

<sup>58</sup> Irfan Fahmi, *Op.Cit.*

mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).<sup>59</sup>

### 3. Tugas OJK dibidang Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan

Terkait tugas OJK dalam hal pengawasan dan pengaturan lembaga jasa Keuangan bank meliputi:<sup>60</sup>

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, *merger*, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit dan standar akuntansi bank.
- 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Beberapa hal yang menjadi perhatian otoritas jasa keuangan diantaranya adalah pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi, praktek perlindungan konsumen yang sama disemua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum optimalnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tugas OJK dalam perlindungan konsumen disektor jasa bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>61</sup>

#### E. Kebijakan

##### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 Pukul 20.42 Wib.

<sup>62</sup> M. Hadjon Philip, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994). h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat vital dalam proses kebijakan publik, karena implementasi menjadi faktor determinan dalam menentukan keberhasilan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persoalan publik. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang sudah direkomendasikan oleh policy makers tidak menjamin kebijakan tersebut pasti berhasil, karena kompleksitas implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel baik variabel individual maupun organisasional. Maka tidak jarang implementasi bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan.<sup>63</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Indro Harto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 92-95

<sup>64</sup> Budi Winarno, *Teori dan kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 101-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai. Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:<sup>66</sup>

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
- b. Menentukan standar pelaksanaan;
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode;

<sup>65</sup> M. Irfan, Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 102

<sup>66</sup> Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tahap III: Merupakan kegiatankegiatan :

- a. Menentukan jadwal;
- b. Melaksanakan pemantauan;
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.
- d. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>67</sup>

Penyusunan Agenda Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan.

- a. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.
- b. Formulasi Kebijakan Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.

---

<sup>67</sup> Budi, Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h. 32-34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

- c. Adopsi Kebijakan Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
- d. Implementasi Kebijakan Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.
- e. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

UIN SUSKA RIAU



## F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam pandangan ekonomi syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan tindakan – tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>68</sup>

### 1. Al-Sulh (Secara damai)

Didalam bahasa arab, perdamaian disebut juga dengan al-shulh, yang mengandung makna memutuskan perkara/perselisihan. Dalam pengertian menurut syariat dirumuskan sebagai suatu akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang berlawanan. Dalam perdamaian terdapat dua pihak yang sebelumnya bersengketa. Kemungkinan, para pihak bermufakat untuk melepaskan sebagian tentunya. Ini dimaksudkan supaya pertengkaran diantara mereka berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih*“anhu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan *mushalih* atau disebut juga *badalush shulh*. Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijma. Sesuai dengan perintah Allah SWT QS. Al Hujurat ayat 9, sebagai berikut:

<sup>68</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di bank syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 107.

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِّلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*<sup>69</sup>

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah ini telah di terapkan pada PT.

BTN Syariah cabang Pekanbaru dengan metode *win win solution* dimana dicari jalan tengah secara damai agar didapat kesepakatan pembayaran hutang kembali.

Langkah ini diambil setelah sebelumnya diingatkan secara berkala baik itu sebelum ataupun setelah jatuh tempo dan setelah memberika surat peringatan 1, surat peringatan 2 serta surat peringatan 3. Selama masa relaksasi debitur diberikan kebebasan tidak mengangsur selama perjanjian relaksasi, sehingga pada saat relaksasi berakhir debitur banyak yang perlu diingatkan kembali untuk pembayaran kredit secara teratur.

## 2. Secara Arbitrase (Al-Tahkim)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dikatakan dengan istilah tahkim. Secara terminologi, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat oleh dua orang yang berselisih atau lebih menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Ruang lingkup

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT.Toha Putra, 2007)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut huququl „ibad (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya, mewajibkan ganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak menyangkut hutang piutang, seperti dalam jual beli, dan sewa- sewanya. Apabila dihubungkan dengan ruang lingkup tugas hakam, maka yang termasuk kedalam kewenangan hanyalah sengketa- sengketa yang berkaitan dengan hak perorangan, dimana ia (perorangan) berkuasa penuh apakah ia akan menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh hakam hanyalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan seperti sengketa yang menyangkut dengan harta benda (dalam bidang muamalah) dan yang sama sifatnya dengan itu. Dasar hukum arbitrase/al-tahkim dalam surah An-Nisa 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT.Toha Putra, 2007)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase berwenang :

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lainlain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas.
2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenan dengan suatu perjanjian.

Kesepakatan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basyarnas, dilakukan oleh pihak :

1. Dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau
2. Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan bersifat mengikat (final and biding). Pada BTN Syariah setelah dilakukan langkah *win win solution* tidak menemukan tidak menemukan titik terang maka selanjutnya akan dilakukan gugatan kepada debitur biasanya dilakukan kepada badan arbitrase, di Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dengan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), Peranan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah sangatlah penting, sebab Basyarnas dalam proses penyelesaian sengketa selain berlandaskan pada hukum Islam juga berlandaskan pada hukum nasional, inilah yang membedakan Basyarnas dengan badan arbitrase lainnya. Landasan hukum Basyarnas yang mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan fiqih. Selain itu, Basyarnas juga berlandaskan pada hukum nasional, yaitu Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN MUI.

### 3. Melalui Lembaga Peradilan (Al-Qadha)

Menurut bahasa, Al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan as-shulh atau attahkim, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalah ke pengadilan. Dasar hukum Al-Qadha ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sebagaimana terdapat dalam QS. Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga qadha ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah mudaniat dan al-ahwal asy-sykhsiyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga) dan masalah jinayat (tindak pidana). Hakim-hakim di pengadilan (Al-Qadha) juga pernah diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) dapat ditempuh oleh bank syariah bilamana penerima pembiayaan tidak beritikad baik, yaitu tidak ada kemauan dalam memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank, yang sengaja disembunyikan oleh penerima pembiayaan, atau penerima pembiayaan memiliki sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan Agama. Tujuan dari keberadaan Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang berAgama Islam, di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Seyogyanya dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah haruslah menurut ketentuan syariah Islam yang dilaksanakan secara kaffah<sup>25</sup>, yaitu dengan benar-benar menerapkan hukum syariah Islam dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah, yang tidak saja dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah,

tetapi juga dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

### G. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian ini penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mutia Pamitkasih dengan judul: Model Kebijakan Relaksasi Pada anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh BMT Tumang dalam merestruktur ulang pembiayaan nasabahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari. Hasil penelitian ini menemukan bahwa layanan BMT cabang Sukoharjo dalam masa *covid 19* menerapkan 3 bentuk konsep yaitu 1) transaksi secara online, 2) transaksi langsung di kantor BMT Tumang cabang sukoharjo, 3) konsep jemput bola. Adapun kebijakan yang dilakukan BMT Tumang kantor cabang Sukoharjo ada tiga tahapan yang dilakukan oleh BMT Tumang kantor cabang Sukoharjo dalam memberikan kebijakan relaksasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anggota nasabah pertama, fase tahap sosialisasi dan pendataan, tahap kedua pihak BMT Tumang kantor cabang Sukoharjo akan melakukan analisis kelayakan pemberian relaksasi dan pemberian keputusan. Ada 3 konsep yang ditawarkan bagi anggota nasabah yang diberikan keringanan pembiayaan: 1) anggota nasabah membayar angsuran 50% dari nominal kewajibannya dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 2) anggota nasabah membayar hanya margin dan melakukan penangguhan pembayaran pokok diakhir periode dengan penambahan jangka waktu 6 bulan. 3) melakukan penangguhan pokok dan margin yang akan dibayarkan diakhir periode tanpa ada penambahan jangka waktu. Tahap ketiga, melakukan pendampingan dalam pemulihan ekonomi.<sup>71</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Marwah dengan judul: Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam. Data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan otoritas jasa keuangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, laporan-laporan hasil penelitian, dan penelusuran berita di media secara *online*. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif agar dapat menjawab permasalahan yang ada. Kebijakan yang telah

<sup>71</sup> Mutia Pamikatsih, *Model Kebijakan Relaksasi Pada anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor cabang Sukoharjo*. AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Vol 3, No 2 (2020). Diakses tanggal 31 Januari 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan oleh OJK tersebut diharapkan dapat membantu pengusaha dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan yang lain. Bencana alam yang terjadi menyebabkan pelaku usaha bidang perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan pendapatan karena bisnis pariwisata lesu. Namun di sisi lain, pelaku usaha tetap diharuskan membayar kewajiban kredit dan biaya operasional akomodasi wisata. Dengan adanya relaksasi kredit, maka pelaku usaha pariwisata dapat memperoleh kelonggaran dalam pembayaran kredit maupun pemotongan bunga pinjaman sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.<sup>72</sup>

3. Penelitian yang ditulis oleh Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono yang berjudul Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. POJK No. 11/POJK.03/2020 menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak *Covid 19* berupa peringanan. kredit. Peringanan kredit ini untuk masyarakat yang sebelumnya harus mengajukan permohonan peringanan terlebih dahulu pada pihak bank. Peringanan berupa penurunan suku bunga, menambah fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal, memperpanjang waktu kredit, pengurang pokok kredit, menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit. Pendekatan masalah yang digunakan dalm penelitian ini pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) menelaah regulasi atau peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang

<sup>72</sup> Marwah, *Relaksasi Kredit Perbankan Di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam*. Jurnal Jurisprudentie Volume 6 Nomor 1 Juni 2019, diakses tanggal 31 Januari 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertitik berat pada substansi atau peraturan hukum yang mengatur hukum perjanjian kredit dibawah tangan pada Perbankan. Permasalahan ini pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi wabah *Covid 19* diharapkan memberikan peraturan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan. Kata dapat digunakan sebagai pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan restrukturisasi kredit tersebut. Ini hanya berlaku pada Bank Negeri saja pengaturan untuk Bank Swata tidak berlaku. Karena dalam melakukan penambahan modal pemerintah hanya memberikan pada bank swasta.<sup>73</sup>

4. Penelitian yang ditulis oleh Sumadi dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia yang berjudul Menakar Dampak Fenomena Pandemi *Covid 19* Terhadap Perbankan Syariah Menjelaskan bahwa *Covid 19* memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Pandemi *Covid 19* menjadi tantangan bagi dunia usaha, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Hal ini menyebabkan sistem keuangan kita tergerus, termasuk bunga di bank konvensional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi operasional yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi perbankan yaitu dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah pandemi *Covid 19*, serta sejauh mana perbankan syariah dapat menjalankan fungsi intermediasinya. Penelitian ini merupakan

<sup>73</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*. Jurnal Sains Sosio Humaniora Universitas Negeri Jambi Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, diakses tanggal 31 Januari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dampak pandemi *Covid 19* terhadap fungsi intermediasi perbankan, berdasarkan hasil studi di Bank Syariah Mandiri yaitu Pembiayaan dan DPK menunjukkan adanya fluktuasi. Di sisi pembiayaan, Bank Syariah Mandiri dari Januari hingga Maret 2020 cenderung mengalami peningkatan. Dari sisi penghimpunan dana (DPK), Bank Mandiri Syariah menunjukkan fluktuasi. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan strategi operasional perbankan. Berdasarkan hasil studi di Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa: Pertama, semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terkena pandemi Covid-19 berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020. Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking untuk bank syariah.<sup>74</sup>

5. Jurnal yang ditulis Mardhiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz yang berjudul Dampak Pandemi Covid - 19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif , merupakan analisis komparatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 pada industri perbankan dari sisi Manajemen strategi operasional Bank dan Kegiatan Intermediasi Bank. Penelitian menggunakan sampel 5 Bank Umum Syariah. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang

<sup>74</sup> Sumadi, *Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UMP Vol.3 No.2 Oktober 2020, diakses tanggal 15 Maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana. Sementara itu, dalam hal Manajemen Strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital.<sup>75</sup>

6. Penelitian yang ditulis oleh Ilhami dan Husni Thamrin yang berjudul Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diambil adalah 6 Bulan (September 2019-Februari 2020) sebelum dan 6 Bulan (April 2020 - September 2020) setelah diumumkannya kasus pertama Covid 19 yaitu pada 2 Maret 2020. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid 19. Di masa pandemi Covid 19 saat ini, Perbankan syariah akan menghadapi beberapa kemungkinan resiko terhadap kinerja keuangan. Untuk itu perlu dilakukan Penelitian untuk menganalisis dampak Covid 19 terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan melakukan analisa Laporan Keuangan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Finance (NPF)* dan *Financing Deposit to Ratio (FDR)*. Data diolah dengan *paired sample t-test*, dengan menggunakan SPSS versi 25. Dari hasil pengolahan data, menunjukkan Secara keseluruhan dampak Covid 19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari

<sup>75</sup> Mardhiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz, *Dampak Pandemi Covid - 19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, <http://ejournals.umma.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

hasil tabel Uji Beda (Uji *Paired Sample T-Test*) rasio CAR, ROA, NPF dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.<sup>76</sup>

Dari keenam penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, secara teknis memang sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain pengambilan data, analisis dan interpretasi data serta penulisan hasil-hasil penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Mutia Pamitkasih misalnya menggunakan metode doktrinal, Penelitian yang ditulis oleh Marwah menggunakan metode empiris dimana mengukur cara perbankan dalam menanggulangi kredit macet pada saat terjadi bencana alam, penelitian yang ditulis Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono menggunakan analisis hukum dengan pendekatan undang-undang, penelitian yang ditulis Mardhiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz merupakan studi komparatif, dan penelitian yang ditulis oleh Husni Thamrin menggunakan metode kuantitatif terhadap laporan keuangan perbankan terdampak *covid 19*, sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap implementasi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan perumahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>76</sup> Ilhami dan Husni Thamrin, *Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 1, Mei 2021. Diakses tanggal 15 Maret 2021.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat difahami secara jelas kesimpulan akhirnya.<sup>77</sup> Peneliti melihat kepada implementasi relaksasi kredit perumahan pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru dalam pengelolaan NPF, sehingga dari hasil pengumpulan data tersebut peneliti mengetahui tentang implementasi relaksasi kredit perumahan dalam pengelolaan NPF di PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Selain itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi ketipian data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>78</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen penting yang memegang kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan

<sup>77</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2010), h. 352

<sup>78</sup> Lexy J. Moelung, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 5-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.<sup>79</sup>

Objek penelitian ini adalah implementasi relaksasi kredit perumahan dalam pengelolaan NPF pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru. Pendekatan kualitatif merupakan proses yang berasal dari wawancara, maupun sejumlah dokumen. Dengan pendekatan kualitatif penulis melakukan analisa dengan menguraikan, menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci melalui hasil wawancara dan dokumen yang dilakukan pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

## B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Arifin Akhmad Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai. Adapun alasan penulis mengambil lokasi peneltian ini karena Bank BTN Syariah adalah BTN salah satu perbankan yang terkena dampak *Covid 19* dan telah melaksanakan relaksasi kredit merujuk pada POJK Nomor 11 tahun 2020, serta kredit perumahan merupakan kredit yang membutuhkan waktu panjang sehingga sangat mempengaruhi terhadap cashflow perusahaan, serta Bank BTN merupakan salah satu bank dengan debitur perumahan yang banyak.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai 08 Maret sampai dengan 08 Mei 2021.

---

<sup>79</sup> Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 1



### C. Keys Informan Penelitian

*Keys Informan* adalah sumber informasi yang digunakan untuk penelitian model kualitatif dimana orang atau pihak tersebut yang paling tepat memberikan informasi yang ada dan pelaku. Dengan demikian, *keys informan* adalah orang yang dianggap peneliti mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti: (1) informan kunci (*keys informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaktif sosial yang diteliti; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.<sup>80</sup>

Pada penelitian ini, peneliti membagi informan sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi kunci adalah Pemimpin Cabang dan Bagian yang menangani langsung relaksasi kredit pada PT. BTN Syariah cabang Pekanbaru.
2. Informasi utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi informan utama adalah nasabah dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Dari informan utama tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lain dengan teknik bola salju (*snowball sampling*). Teknik ini digunakan untuk mencari

<sup>80</sup> Suryanto Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Media Grup, 2005), h. 171-

informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau jika data tidak berkembang lagi. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, makin lama semakin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap.<sup>81</sup>

## D. Sumber data penelitian

### 1. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data yang merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, yakni subyek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari partisipan secara langsung.<sup>82</sup> Sumber dari data primer adalah pinca, bagian relaksasi kredit, dan nasabah yang mendapat relaksasi kredit di PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder, data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007), h. 15

<sup>82</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 173

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan penulis serta dari studi pustaka dan literatur pendukung lainnya.

- c. Data tersier, merupakan sumber pelengkap data primer dan sumber data sekunder, sumber data tersier ini diperoleh melalui website-website, foto, dokumen bank, dan sebagainya yang dapat mendukung data yang dibutuhkan peneliti.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan.<sup>84</sup> Observasi diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.<sup>85</sup> Dalam hal ini penulis langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi relaksasi kredit perumahan dalam pengelolaan NPF pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru. Pengamatan dilakukan secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian.

<sup>83</sup> Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.190

<sup>84</sup> M. Ikbil Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 82

<sup>85</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### E. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan secara bersamaan dengan analisis data. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan deskripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut

- b. Wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih behadap-hadapan secara fisik.<sup>86</sup> Penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan terstruktur secara langsung kepada responden yang dianggap mengerti, mengetahui dan menjadi bagian dalam penelitian ini. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.
- c. Tinjauan Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku – buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Tinjauan pustaka dibuat untuk mengemukakan teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>87</sup>
- d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam penelitian ini.<sup>88</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mempelajari arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Seperti surat-surat yang berhubungan dengan relaksasi kredit, dokumen pelaksanaan relaksasi kredit dan lain sebagainya.

<sup>86</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 160.

<sup>87</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h. 163.

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 141



dan memungkinkan kita menyajikan apa yang sudah kita temukan kepada orang lain.<sup>89</sup>

Menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analysis data yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion/drawing/verification*. Adapun proses analisis data dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>90</sup>

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kkomplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dataselanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapt dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek –aspek tertentu.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

<sup>89</sup> Emzir, *Metodology Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 85.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualititaif dan R & D* ( Bandung: Alfabeta, 2013), h. 246 – 253.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984), menyatakan sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks bersifat naratif.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Menarik kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksud untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta ditambah dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan).

### BAB III : METODE PENELITIAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, informan atau populasi dan sampel penelitian dan analisis data.

## BAB IV

### : HASIL PENELITIAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

## BAB V

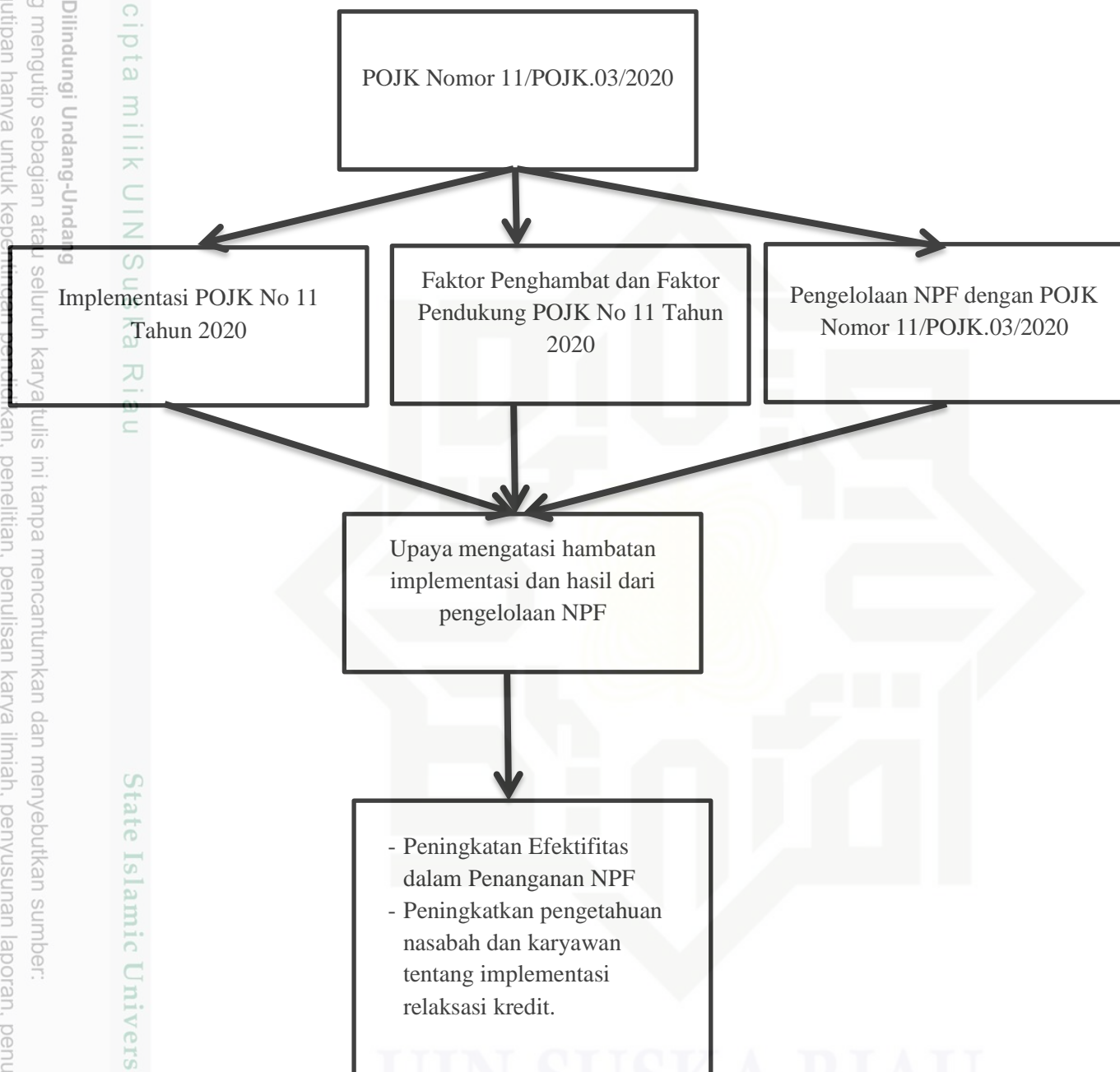
### : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

## G. Kerangka Berfikir

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang menjadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun kerangka pikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

## KERANGKA BERFIKIR





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

- a. Implementasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak Covid 19 di PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru telah terlaksana dengan baik. Terbukti dengan telah berjalan dengan baik program relaksasi sehingga membantu penanganan NPF.
- b. Faktor pendukung relaksasi pembiayaan perumahan terdampak Covid 19 adalah waktu lebih fleksibel sehingga memudahkan penyelesaian, membantu debitur yang mempunyai iktikat baik, sedangkan Faktor penghambat dari penelitian ini adalah banyak debitur tidak mengetahui tentang mekanisme dan syarat-syarat pengajuan relaksasi pembiayaan, kurangnya edukasi/sosialisasi mengenai relaksasi.
- c. Pengelolaan NPF pada BTN Syariah cabang Pekanbaru setelah adanya relaksasi adalah dengan membagi atas dua hal (1) dengan melakukan penyelamatan kredit dimana relaksasi termasuk didalamnya, (2) dengan penyelesaian kredit yaitu dengan metode *win win solution*, memperkarakan di badan arbitrase, serta di peradilankan.

#### 2. Saran

- a. Hendaknya BTN Syariah cabang Pekanbaru memberikan opsi lain selain *rescheduling* kepada nasabah, sesuai dengan POJK Nomor 11/POK.03.2020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengakomodir kendala pemberian relaksasi kredit bagi pembiayaan perumahan oleh PT. BTN Syariah cabang Pekanbaru pasca berlakunya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 relaksasi *covid 19* hendaknya dilakukan dengan analisis yang lebih maka bank harus memberikan pengumuman secara langsung kepada debitur terkait ketentuan dan mekanisme pemberian relaksasi kredit agar meminimalisir kendala saat pemberian relaksasi kredit.
- c. Untuk mengakomodir pengelolaan NPF pasca relaksasi kredit hendaknya dilakukan secara extra karena debitur sudah terbiasa untuk 6 (enam) bulan tidak melakukan pembayaran baik itu sebelum maupun setelah jatuh tempo kredit.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2010.
- Ahmad Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Beni Ahmad Subaini, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Duwi Prayitno, *Mandiri Belajar SPSS Statistic Product and Service Solution*, Yogyakarta: Mediacom, 2008.
- Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Hasani Ahmad, *Menimbang Perbankan Syariah* dalam Jurnal Bimas Islam (Vol. 2. No. 3, 2009), h. 54.
- H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves, 2007.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Lexy J. Moelung, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- M. Ikbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Pers, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Riduwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabet, 2006.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008
- Suryanto Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Media Grup, 2005
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sutojo, Siswanto *Menagani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus* Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2009.
- Trisadini, P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Askara, 2013.
- Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Trisadini, P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013).
- Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. Bandung: Universitas Pasundan.
- Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” dalam *Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Cet. I; Bandung:2009).
- Veithzal Riavai dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financing Institution Management Conventional & Shariah System*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* , (Tangerang: Azkia Publisher, 2009).
- Sumber Lain :**
- <http://www.ojk.go.id>
- <https://corona.riau.go.id/>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Stimulus\\_\(ekonomi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Stimulus_(ekonomi)),
- <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>,
- <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR WAWANCARA TESIS**  
**IMPLEMENTASI RELAKSASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**TERDAMPAK COVID -19 DALAM PENGELOLAAN NON**  
**PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT.BANK TABUNGAN**  
**NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU**

Oleh : Farri Fadli

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Lokasi :

Narasumber :

1. Bagaimana menurut bapak perkembangan nasabah bapak semenjak terjadinya covid -19 ?
2. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa BTN Syariah menerapkan Relaksasi untuk kredit perumahan, bagaimana penerapan hal tersebut?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat hal tersebut? .
4. Apakah relaksasi berpengaruh terhadap NPF ?
5. Apakah dengan adanya relaksasi kredit membantu nasabah maupun perusahaan dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
6. Adakah biaya-biaya tambahan yang harus diberikan nasabah dalam proses relaksasi?
7. Berapa lama rata-rata nasabah melakukan relaksasi?
8. POJK Nomor 11/1.3-POJK/2020 dikeluarkan sejak maret 2020 sudah berapa banyak nasabah yang mengajukan relaksasi?
9. Bagaimana proses relaksasi?
10. Misalnya seorang nasabah mendapat relaksasi selama 6 bulan apakah setelah itu nasabah boleh mengajukan relaksasi lagi?.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Menurut Bapak bagaimana keadaan NPF setelah dan sebelum adanya program relaksasi?
12. Selain relaksasi upaya-upaya apa saja yang bapak lakukan untuk pengelolaan NPF?





**DAFTAR WAWANCARA TESIS**  
**IMPLEMENTASI RELAKSASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**TERDAMPAK COVID -19 DALAM PENGELOLAAN NON**  
**PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT.BANK TABUNGAN**  
**NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU**

Oleh : Farri Fadli

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Lokasi :

Narasumber :

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah BTN Syariah Cab. Pekanbaru?,
2. Apakah bapak ibu mengetahui tentang relaksasi kredit ?
3. Bagaimana proses bapak/ibu mendapat kan relaksasi kredit?.
4. Apakah bapak/ibu di mintai biaya tambahan untuk melakukan relaksasi kredit?
5. Apakah bapak ibu merasa terbantu dengan terjadinya relaksasi kredit ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 /POJK.03/2020  
TENTANG

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN  
*COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;
  - bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
  - bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat

Menetapkan

- bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
  - b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19); dan
  - b. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### PENETAPAN KUALITAS ASET

#### Pasal 3

- (1) Penetapan kualitas aset berupa:
  - a. kredit pada BUK;
  - b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
  - c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
- (2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.
- (3) Plafon:
  - a. kredit pada BUK;
  - b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
  - c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan kualitas aset berupa:
  - a. kredit pada BPR; dan/atau
  - b. pembiayaan pada BPRS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
- (2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Plafon:
  - a. kredit pada BPR; dan/atau
  - b. pembiayaan pada BPRS,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.

### BAB III

#### RESTRUKTURISASI KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

##### Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

## BAB IV

### PEMBERIAN PENYEDIAAN DANA BARU

#### Pasal 7

- (1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya.
- (3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); atau
  - b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
- (2) Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 9

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan posisi akhir bulan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi akhir bulan April 2020, bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021.
- (2) Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.



## BAB VI MASA BERLAKU PEMBERIAN STIMULUS

### Pasal 10

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424); dan
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan  
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 /POJK.03/2020  
TENTANG

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN  
*COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

1. UMUM

Penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).





Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Contoh:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) serta *travel warning* beberapa negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank:

- a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
- d. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

- a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum; atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

- bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
- bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan plafon.

Ayat (2)

Pelaksanaan restrukturisasi:

- kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
- pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
- pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6

Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Contoh:

Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur “A” setelah terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Kredit debitur “A” tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf b

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

1. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
2. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
4. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6480



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11 /POJK.03/2020

TENTANG

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN  
*COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS*  
*DISEASE* 2019

**Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran**

Nama Bank :

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

No	Nama Debitur	CIF	Sektor Ekonomi	Plafon (dalam jutaan rupiah)	Baki Debet (dalam jutaan rupiah)	Kualitas Aset	Keterangan

Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran hanya diisi untuk debitur dengan plafon:
  - a. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi BUK, BPR, dan BPRS;
  - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain berorientasi ekspor, bagi BUS dan UUS; atau
  - c. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain selain huruf b, bagi BUS dan UUS.
3. Dalam hal debitur memiliki beberapa rekening, Bank melaporkan 1 (satu) debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif pada laporan ini.
4. “Plafon” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) debitur.
5. Dalam hal debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).
6. Jenis Sektor Ekonomi sebagai berikut:
  - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
  - b. pertambangan dan penggalian;
  - c. industri pengolahan;
  - d. konstruksi;
  - e. perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor;
  - f. pengangkutan dan pergudangan;





- g. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- h. agen perjalanan;

- i. kesenian, hiburan, rekreasi; atau
- j. lainnya (sebutkan).

7. “Kualitas Aset” merupakan kualitas aset kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain saat posisi bulan laporan dan diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet).

8. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Contoh:

- a. penutupan jalur transportasi;
- b. rantai suplai;
- c. penundaan proyek; atau
- d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

## Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi

Nama Bank :  
Posisi Laporan : Bulan/Tahun

No	Nama Debitur	CIF	Sektor Ekonomi	Plafon (dalam jutaan rupiah)	Baki Debet (dalam jutaan rupiah)	Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi	Keterangan

### Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan ini diisi dengan data per rekening kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Contoh:

- a. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan hanya rekening 1 yang dilakukan restrukturisasi maka hanya rekening 1 yang dilaporkan.



- b. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan semua rekening dilakukan restrukturisasi maka Bank melaporkan setiap rekening pada baris yang berbeda.

3. “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi untuk kredit atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi. Pengisian “Sektor Ekonomi” mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.

4. “Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi” diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet).

5. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengisian “Keterangan” mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

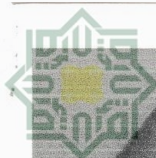
WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan  
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari





# CHECK LIST KELENGKAPAN DOSSIER RESTRUKTURISASI

Muhammad Rizgan

NO: 71303624

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacitakan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BERKAS		Ada	KETERANGAN / CATATAN
KELENGKAPAN DATA NASABAH		Tidak	
a.	Surat Permohonan Nasabah		
b.	Fotokopi KTP terbaru (Suami - Istri) (Elektronik)		
c.	Fotokopi KK terbaru		
d.	Fotokopi Surat Nikah / Akta Nikah		
<b>Apabila Pemohon Pegawai :</b>			
e.	Slip Gaji Terbaru (Asli)		
f.	Surat Keterangan Kerja (Terbaru)		
<b>Apabila Pemohon Pemohon Usaha / Pekerja Mandiri :</b>			
g.	Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan (Asli)		
h.	Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan (Asli)		
<b>Kelengkapan dari pihak Bank</b>			
i.	Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan		
j.	Addendum Restrukturisasi Pembiayaan		
k.	Surat Permohonan Diskon dan Penundaan		
l.	Surat Pernyataan dan Kuasa		
m.	Surat Pernyataan Janji Bayar		
n.	Surat Keterangan Ahli Waris		
o.	One Marking Notaris		
p.	Memo Realisasi (Eksekusi)		

Pekanbaru, \*

Feby Satrya HP  
Restructuring Analyst





## SURAT PERNYATAAN

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI FEBRIANTO  
 No. KTP : 1471 0921 05 000001  
 Tempat/Tgl Lahir : PEKAN BARU, 21 - 05 - 1988.  
 No. Pembiayaan (Loan) :  
 Alamat Asunan : Jl. Kubang RAYA.  
 Alamat Tinggal : PERUM GRIYA MAZUA AULIA.  
 No. Handphone : 08123 9114 9921  
 Alamat Email :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa adalah benar saya sedang mengajukan permohonan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru
2. Saya mengajukan Restrukturisasi karena kondisi usaha / Pekerjaan / Bisnis saya terdampak penyebaran Virus Corona (Covid-19) sehingga menyebabkan saya kesulitan dalam memenuhi kewajiban saya ke Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
3. Adapun Usaha / Pekerjaan / Bisnis Saya bergerak disektor ..... (Wajib Diisi)

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut, saya bersedia menghadap dan memberikan keterangan kepad Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan seperlunya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,



(BUDI FEBRIANTO)

No. Pembiayaan :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERMOHONAN

Pekanbaru,

: Surat Permohonan  
: Berkas Pendukung

Kepada Yth.  
Kepala Cabang BTN Syariah Pekanbaru  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini saya Nasabah KPR BTN Syariah dengan data sebagai berikut :

No. loan : 7121430  
Nama : BUDI FEBRIANTO  
Umur : 41 th  
Alamat : JL KUBANG RAYA  
No. Telp. : 0823 9114 9921  
Pola : PUSP / PUST / Grace Periode  
Langka Waktu : th

Bermaksud mengajukan permohonan Restruk dengan Pola PUSP/PUST/Grace Periode. Adapun latar belakang saya mengajukan permohonan ini adalah karena

DEMASUKAN MESURUL

(Wajib Diisi)

Besar harapan saya jika permohonan ini dapat terlaksana. Dan apabila terlaksana saya berkomitmen untuk menjalankan kewajiban saya sebagai Nasabah KPR BTN Syariah Pekanbaru dengan lebih disiplin untuk menghindari tunggakan yang berkepanjangan dan apabila saya menunggak angsuran, maka saya bersedia rumah/ agunan untuk dilelang atau dijual.

Demikian permohonan saya, mudah-mudahan dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Permohon,

(BUDI FEBRIANTO)  
Nama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyalahgunaan  
Lampiran

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk  
KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU

Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur

Kec. Marpojan Damai

Pekanbaru 28125

Telp. (0751) 7891314

www.btn.co.id

Bank **BTN**

/SPRP/PKB/SUPP/II/2021

Pekanbaru, 12 June 2021

Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP)

Gita Mayora

75400442

Yang terhormat,

Sehubungan dengan surat permohonan saudara tanggal 03 June 2021 perihal Surat Permohonan, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Grace Periode saudara telah DISETUJUI dengan rincian sbb :

Rincian Restrukturisasi Pembiayaan ( Grace Periode )

- Oustanding Pembiayaan : Rp 133,214,874
- Jangka Waktu Penagguhan : 6 Bulan dari tanggal Addendum
- Periode Penagguhan : Juli 2021 s.d Desember 2021
- Jatuh Tempo : 24 November 2032
- Angsuran Terbaru/bulan : Rp 938,133
- Alamat Agunan : PERUM MEGA PANAM RAYA 2 A/27 JL. MANUNGAL DESA RIMBO PANJANG KEC.TAMBANG KAMPAR

2. Biaya – Biaya yang timbul akibat restrukturisasi pembiayaan KPR ini menjadi beban saudara dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Notaris : Rp 100,000
- Biaya Administrasi : Rp 937,500 (Diskon 100%)
- Ass. Jiwa Perpanjangan
- Ass. Kebakaran Perpanjangan
- Angsuran Blokir : 938,133
- Ta'widh

Total Biaya Rp 1.975,633

3. Penandatanganan addendum akad pembiayaan paling lambat tanggal 14 Juni 2021, apabila sampai dengan tanggal tersebut nasabah tidak melakukan penandatanganan addendum akad pembiayaan maka kebijakan restrukturisasi ini gugur dengan sendirinya.

Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Akad Pembiayaan Nomor : 75400442 tertanggal 24 November 2017.

Semua ketentuan dan syarat dalam akad Pembiayaan Nomor : 75400442 tertanggal 24 November 2017 tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak kecuali yang dilakukan perubahan dengan SPRP ini dan/atau surat / akta lain sebagai tindak lanjut dari Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan (SPRP) ini.

Dengan penandatanganan surat ini diatas materai cukup, kedua belah pihak menyetujui berlakunya perubahan/tambahan (Addendum) atas Akad Pembiayaan KPR BTN Syariah Nomor : 75400442 tertanggal 24 November 2017.

Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan ini memuat syarat-syarat persetujuan restrukturisasi fasilitas pembiayaan saudara dan belum bersifat mengikat. Syarat - syarat selengkapnya harus dituangkan dalam addendum akad Pembiayaan sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk  
Kantor Cabang Syariah PEKANBARU  
Jl. Sultan Ahmad Kel. Sidomulyo Timur  
Kec. Marpoyan Damai  
Kota Pekanbaru 28125  
Telp. (0761) 7891314  
Email: btn.co.id

Sehubungan atas Saudara maklum, atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk  
Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Asep Wahyuman  
Branch Manager

Ahmad Ridha  
DBM Supporting

Setelah mempelajari seluruh isi Surat Persetujuan ini, maka saya menyatakan telah memahami dan untuk selanjutnya menyetujui serta sanggup untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh Bank.

(Gita Maiyora)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang  
**ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN KPR BTN SYARIAH**  
**ANTARA**  
**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), Tbk.**  
**DAN**  
**Gita Maiyora**  
**No. Loan 75400442**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditanda tangan di bawah ini :

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. berkedudukan di Jakarta dan ber Kantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat dalam hal ini melalui, Kantor Cabang Syariah : PEKANBARU  
Diwakili oleh : ASEP WAHYUMAN  
Dan Kapasasnya selaku : BRANCH MANAGER

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk. dalam hal ini diwakili oleh ASEP WAHYUMAN, selaku Kepala Cabang Syariah Pekanbaru berdas Asas Kuasa Nomor 46 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SITI RAYHANA, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, berdasarkan Keputusan M Pengawas Syariah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 005/MPWN.IKT/CT/II/2009 tanggal 10 Februari 2009, pengganti dari Bando Rade Mulyastoto Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Anggaran l diubah berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51, tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Fathiah H SH Notaris di Jakarta yang pembentukannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AH.01.03-0226094 tanggal 21 April 2015, berkedudukan di Jakarta dan ber Kantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya di sebagai Bank.

Nama : Gita Maiyora  
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Balit, 11 May 1993  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat KTP : Panangrit 000 Rw 000Kab. Limapuluh Koto

Alamat Agunan : PERUM MEGA PANAM RAYA 2 A/27 JL. MANUNGAL DESA RIMBO PANJANG KEC.TAMBANG  
Nomor KTP/SIM : 1307065105930000

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut **NASABAH**.

yang menunjuk :

Akad Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") atas Akad Pembiayaan KPR BTN IB Nomor : 75400442 tertanggal 24 November 2017  
Surat Permohonan dari nasabah tanggal 03 June 2021 Perihal Surat Permohonan.  
Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan No /SPRP/PKB/SUPP/VI/2021 tertanggal 12 June 2021

Akka dengan ini kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) telah sepakat untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan terhadap Akad Pembi Murabahah KPR BTN Syariah yang telah ditandatangani sebelumnya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Akad pembiayaan Nomor : 75400442 tertanggal 24 November 2017 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

**1.1 RINCIAN PEMBIAYAAN :**

a. Outstanding Pokok	Rp	99,169,687
b. Margin	Rp	34,045,187
c. Harga Jual Bank	Rp	133,214,874
d. Angsuran per bulan	Rp	938,133
e. Waktu Grace Periode		Juli 2021 s.d Desember 2021
f. Hari Pembayaran		24-Jan-22
g. Tanggal Pembayaran Angsuran		Setiap tanggal 24 setiap bulannya, dimulai 24 Januari 2022

2. Biaya-biaya yang timbul akibat restrukturisasi pembiayaan menjadi beban Nasabah pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank.
3. Nasabah yang melakukan pembayaran angsuran secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang telah diatur di dalam addendum akad ini. Dan apabila terdapat tunggakan angsuran, Nasabah menerima segala tindakan yang dilakukan oleh Bank sebagai konsekuensi dengan surat pernyataan terlampir.
4. Terhadap ketentuan-ketentuan pada Akad Pembiayaan Murabahah KPR BTN Syariah Nomor : 75400442 tertanggal 24 November 2017 yang tidak ada perubahan melalui Addendum ini, masih tetap berlaku dan mengikat bagi Bank dan Nasabah.
5. Addendum ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.



Pekanbaru, 12 June 2021  
PEMOHON

Gita Maiyora  
NASABAH

Mengetahui/menyetujui  
Suami/istri

Asep Wahyuman  
BRANCH MANAGER

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR WAWANCARA TESIS**  
**IMPLEMENTASI RELAKSASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**TERDAMPAK COVID -19 DALAM PENGELOLAAN NON**  
**PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT.BANK TABUNGAN**  
**NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU**

Oleh : Farri Fadli

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Lokasi :

Narasumber :

1. Bagaimana menurut bapak perkembangan nasabah bapak semenjak terjadinya covid -19 ?
2. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa BTN Syariah menerapkan Relaksasi untuk kredit perumahan, bagaimana penerapan hal tersebut?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat hal tersebut? .
4. Apakah relaksasi berpengaruh terhadap NPF ?
5. Apakah dengan adanya relaksasi kredit membantu nasabah maupun perusahaan dalam mengatasi permasalahan kredit macet?
6. Adakah biaya-biaya tambahan yang harus diberikan nasabah dalam proses relaksasi?
7. Berapa lama rata-rata nasabah melakukan relaksasi?
8. POJK Nomor 11/1.3-POJK/2020 dikeluarkan sejak maret 2020 sudah berapa banyak nasabah yang mengajukan relaksasi?
9. Bagaimana proses relaksasi?
10. Misalnya seorang nasabah mendapat relaksasi selama 6 bulan apakah setelah itu nasabah boleh mengajukan relaksasi lagi?.



11. Menurut Bapak bagaimana keadaan NPF setelah dan sebelum adanya program relaksasi?
12. Selain relaksasi upaya-upaya apa saja yang bapak lakukan untuk pengelolaan NPF?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR WAWANCARA TESIS**  
**IMPLEMENTASI RELAKSASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN**  
**TERDAMPAK COVID -19 DALAM PENGELOLAAN NON**  
**PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT.BANK TABUNGAN**  
**NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU**

Oleh : Farri Fadli

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Lokasi :

Narasumber :

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah BTN Syariah Cab. Pekanbaru?,
2. Apakah bapak ibu mengetahui tentang relaksasi kredit ?
3. Bagaimana proses bapak/ibu mendapat kan relaksasi kredit?.
4. Apakah bapak/ibu di mintai biaya tambahan untuk melakukan relaksasi kredit?
5. Apakah bapak ibu merasa terbantu dengan terjadinya relaksasi kredit ini?

UIN SUSKA RIAU





State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Akreditasi B

SK No: 197/BAN PAUD DAN PN/AKR/2019

Certificate Number: 361/HOMIE/VII/2021

TOEFL®

# CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : FARRI FADLI  
ID Number : 1401043010920001  
Test Date : 04-07-2021  
Expired Date : 04-07-2023

achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 51
Structure and Written Expression	: 55
Reading Comprehension	: 52
Total	: 527



Robi Kurniawan, M. A.  
Homie English Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/XII/2017/8700

Under the auspices of:

HOMIE ENGLISH

At: Pekanbaru

Date: 05-07-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

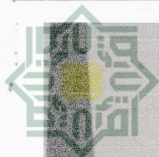
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Akreditasi B

SK No: 197/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

Izin No: 420/BID. PAUD. PNF.2/XII/2017/6309



in collaboration with



Provide magnificent language services

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# اختبار، اختبار اللغة العربية لغير ناطقين بها

## شهادة الانجاز

هذا لشهد ان

اسم : FARRI FADLI  
رقم الهوية : 1401043010920001  
تاريخ : 04-07-2021  
صلح حتى : 04-07-2023

حصل النتيجة التالية في اختبار لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع	: 51
القواعد	: 58
القراءة	: 48
النتيجة	: 523

No. 362/HOMIE/VII/2021



Robi Kurniawan, M. A.  
Homie English Director



Izin No: 420/BID. PAUD. PNF.2/XII/2017/8700

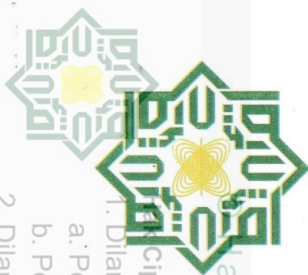
Under the auspices of:

HOMIE ENGLISH

At: Pekanbaru

Date: 05-07-2021





UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 0635/Un.04/Ps/PP.00.9/2021 Pekanbaru, 08 Maret 2021  
 Lamp. : 1 berkas  
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada  
 Yth. Gubernur Riau  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
 Satu Pintu Riau  
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: FARRI FADLI
NIM	: 21790315635
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: VIII (Delapan) / 2021
Judul Tesis/Disertasi	: IMPLEMENTASI RELAKSASI REMBIAYAAN PERUMAHAN TERDAMPAK COVID -19 DALAM PENGELOLAAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA .PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU

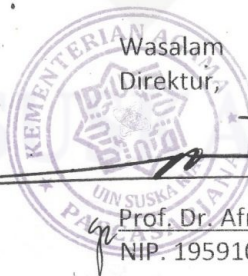
untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari PT. BANK BTN SYARIAH CABANG PEKANBARU

Waktu Penelitian: 3 Bulan (08 Maret 2021 s.d 08 Mei 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal. M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 0635/Un.04/Ps/PP.00.9/2021 Pekanbaru, 08 Maret 2021  
 Lamp. : 1 berkas  
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada  
 Yth. Gubernur Riau  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
 Satu Pintu Riau  
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : FARRI FADLI  
 NIM : 21790315635  
 Program Studi : Ekonomi Syariah S2  
 Semester/Tahun : VIII (Delapan) / 2021  
 Judul Tesis/Disertasi : IMPLEMENTASI RELAKSASI  
 PEMBIAYAAN PERUMAHAN  
 TERDAMPAK COVID -19 DALAM  
 PENGELOLAAN NON PERFORMING  
 FINANCING (NPF) PADA PT. BANK  
 TABUNGAN NEGARA SYARIAH  
 CABANG PEKANBARU

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari PT. BANK BTN SYARIAH CABANG PEKANBARU

Waktu Penelitian: 3 Bulan (08 Maret 2021 s.d 08 Mei 2021)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam  
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal. M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41557  
T E N T A N G

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 0635/Un.04/Ps/PP.00.9/2021 Tanggal 8 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>FARRI FADLI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 21790315635   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Konsentrasi       | : | EKONOMI SYARIAH   |
| 5. Jenjang           | : | S2  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPLEMENTASI RELAKSASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN TERDAMPAK COVID-19 DALAM PENGELOLAAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### **Tembusan :**

#### **Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru di Tempat
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pekanbaru, 24 Juni 2021

No : 787/PKB/SUPP/MI/2021  
Lamp : -  
Hal : **Surat Keterangan Pelaksanaan Riset**

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**  
di-  
**Pekanbaru**


Menunjuk surat No. 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41557 tanggal 07 Juni 2021 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Tesis, dengan ini kami menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :


Nama : **FARRI FADLI**  
NIM : 21790315635  
Jurusan : Ekonomi Syariah S2  
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI RELAKSASI PEMBIAYAAN PERUMAHAN TERDAMPAK COVID-19 DALAM PENGELOLAAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG PEKANBARU**

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengumpulan data untuk bahan Tesis pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU**

  
**Ahmad Ridha**  
DBM Supporting

  
**Syuria Khairenni**  
Operation Unit Head

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Kantor Cabang Syariah Pekanbaru  
Jl. Arifin Ahmad  
Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai  
Pekanbaru 28125

T +62 761 789 1314, 789 1315  
E kcs.pekanbaru@btn.co.id  
[www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

No.NPWP: 01.001.609.5-216.001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Farri Fadli

NIM

217 90319035

PROGRAM STUDI

Pasca Sarjana

KONSENTRASI

Ekonom Syariah

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Mahyarni, SE, MM

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Julina, SE, MM

JUDUL TESIS/DISERTASI

Implementasi Relokasi Pemukiman  
Perumahan Terdampak Candi Ig Dalam  
Pengadaan Non Performing Financing  
(NPF) pada PT. ARN Syariah dengan  
Pendanaan

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	03/3/21	Kas I Perbaikan	Wg	
2.	15/3/21	Kas I Tinjauan Pustaka.	Wg	
3.	20/3/21	Kas II metode	Wg	
4.	22/6/21	Kas II Perbaikan	Wg	
5.	25/6/21	Kas I SFB V Revisi secara menyeluruh	Wg	
6.	29/6/21	Ace	Wg	

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu  
Pekanbaru, ... 28 Juni ..... 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	24/3/2021	Konsultasi wawancara Kas I & Kas II	Wg	
2.	30/3/21	Kas II Revisi	Wg	
3.	17/4/21	Kas III Revisi	Wg	
4.	29/5/21	Perbaikan wawancara Kas I & II SFB Kas II	Wg	
5.	20/6/21	Perbaikan Kas I & II Revisi secara menyeluruh	Wg	
6.	30/6/21	Ace	Wg	

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru, ... 30/6/ ..... 2021

Pembimbing II / Co Promotor \*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### BIODATA PENULIS



Penulis bernama Farri Fadli, lahir pada tanggal 30 Oktober 1992, di Tanjung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Anak ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Yuzarai dan Darnis. Menikah dengan Nursapta Khairani pada tahun 2018. Adapun riwayat pendidikan yaitu Penulis menamatkan pendidikan dasarnya di SDN 015 Gunung Bungsu pada tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Model Kuok Bangkinang Barat dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN Kuok Bangkinang Barat dan tamat pada tahun 2010.

Setelah menamatkan pendidikan menengah atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata-1 mengambil Jurusan Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Pasca Sarjana Strata-2 mengambil Jurusan Ekonomi Syari'ah.

UIN SUSKA RIAU